



Bangunan Harus Ramah Difabel

Yogyakarta Berbenah Menuju Kota Inklusif



Kota Yogya untuk Semua

- Kota Yogya mempersiapkan berbagai layanan dan fasilitas yang nyaman dinikmati semua orang.
- Satu di antaranya adalah ramah bagi difabel, baik layanan dan fasilitas.
- Saat Perda Disabilitas disahkan, bangunan publik milik swasta wajib menyediakan akses untuk difabel.
- Saat ini mayoritas baru gedung milik pemerintahan yang sudah memiliki akses untuk difabel.
- Kota Yogya sudah membuat kebijakan afirmasi 5 kelompok, yakni difabel, miskin, perempuan, anak, dan lansia.
- Data 2017 tercatat ada 2.081 difabel di Kota Yogyakarta.
- Jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah lantaran data belum sepenuhnya akurat karena sejumlah faktor.

GRATIS/PALIZIA RAHMADAN

Bangunan pemkot yang baru memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Tapi yang belum (bangunan) yang swasta.

Herroe Poerwadi

YOGYA, TRIBUN - Ketika Perda Disabilitas disahkan, seluruh pihak yang hendak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) harus memastikan bangunan mereka dapat diakses oleh penyandang disabilitas (difabel) dan lansia. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Herroe Poerwadi, saat memberikan keterangan terkait upaya Kota Yogyakarta yang menjadi *city for all* atau kota yang nyaman dihuni oleh semuanya, satu di dalamnya adalah kota inklusif.

● ke halaman 15

Bangunan Harus Ramah Difabel

• Sambungan Hal 9

"Bangunan pemkot yang baru memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Tapi yang belum (bangunan) yang swasta, misal hotel dan mal. Itu bisa terimplementasi ketika perda (sudah) jadi. Nanti IMB harus memberikan akses pada lansia dan disabilitas," tegasnya. Senin (22/10).

Heroe menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum memiliki pakem terkait model kota inklusi. Pasalnya, hingga saat ini kebutuhan kota yang bisa mengakomodasi kelompok rentan khususnya disabilitas terus berkembang.

"Modelnya bukan statis tapi dinamis. Tapi proses menjadi kota inklusi sangat panjang karena harus sesuai dengan yang berkembang di kota itu. Misal Yogya dengan predikat kota pendidikan dan kota wisata. Ofomafis, mau tidak mau harus menyiapkan bahwa semua aksesnya harus inklusi. Jangan sampai kelompok rentan masuk ke objek wisata tapi tidak memadai," urainya.

Terkait kota inklusi tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta mengundang 17 Pokja Kota menuju Inklusi se-Indonesia untuk menghadiri Lokakarya Nasional dengan bahasan utama membuat *road map* mewujudkan kota inklusi di wila-

yahnya masing-masing, hari ini, Selasa (23/10).

"Tujuan pertemuan ini mendorong partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan inklusi. Harapannya ini menjadi tekad bersama, yakni pemkot dan pemkab, untuk memberikan akses kepada kelompok rentan," ucapnya.

Heroe menambahkan, Kota Yogyakarta telah memulai menata diri menjadi kota inklusi dengan membuat kebijakan afirmasi pada 5 kelompok, yakni disabilitas, miskin, perempuan, anak, dan lansia.

"Bagian dari ini nanti didiskusikan bersama. Bagaimana memberikan akses pada kelompok rentan untuk pembangunan. Nanti akan ada deklarasi agar semua kota membuat *road map*. Pembangunan kota di dunia saat ini punya paradigma baru, *city for all*. Ini salah satu unsurnya kota inklusi. Selain itu ada juga kota pedestrian dan kota hijau," pungkasnya.

Pendataan

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bejo Suwarno menjelaskan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.081 penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta. Namun, jumlah tersebut masih bisa bertambah dikarenakan pihaknya mengalami hambatan teknis pada saat pendataan. "Masih banyak masyarakat yang menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas," jelasnya.

Dinas sosial telah melakukan pendataan disabilitas melalui KMS. Namun, terdapat warga lain yang merupakan disabilitas di luar KMS. Mereka belum terdata pada saat survei KMS berlangsung. "Ada sekitar 800 disabilitas yang non-KMS, sehingga setelah dijumlah didapatkan total pada 2017 terdapat 2081 disabilitas," ujarnya. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad menjelaskan, pihaknya mendudukkan kelompok rentan sebagai subyek pembangunan. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perlindungan dan hal dari akses, kesempatan, dan kesetaraan.

"Pemkot telah memfasilitasi disabilitas dalam pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga terkait fisik sarana prasarana mereka mendapat perlindungan dari sisi hukum. Makanya ada Komite Disabilitas yang dibentuk pemkot," tuturnya.

Selanjutnya, Edy menambahkan dalam membangun pelayanan dasar, harus melibatkan kedua belah pihak, yakni pemerintah kota dan juga penyandang disabilitas.

"Sudah berjalan. Keberlanjutan dan komitmen ada di Perda Disabilitas ketika ditetapkan nanti. Perda itu akan mengatur, bagaimana pemerintah, swasta, masyarakat, keluarga harus memberikan kesempatan dan kesetaraan aksesibilitas bagi mereka," ungkapnya. (kur)

Ada Ketimpangan Akses Informasi

PENASIHAT Teknis untuk Perempuan dan Gender, Anggjaari Puji Aryati menjelaskan, selain masalah akses fisik bagi kaumnya, difabel, masalah yang ma-

sih dirasakan adalah terkait ketimpangan informasi. Termasuk ketika ada slot bagi penyandang

● ke halaman 15

Ada Ketimpangan Akses Informasi

● Sambungan Hal 9

disabilitas dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.

"Masih banyak teman-teman disabilitas yang tidak tahu ada kesempatan bagi mereka daftar CPNS. Lalu bagaimana prosedur untuk mengakses juga jadi masalah. Informasi ini yang masih jadi *gap* untuk dicapai penyandang disabilitas," urainya, Senin (22/10).

Ia menjelaskan bahwa tidak sedikit dari mereka yang tidak lancar membaca dan menulis karena sewaktu kecil disembunyikan oleh pihak keluarga dan tidak mendapatkan akses

pendidikan yang baik. "Walaupun sekarang banyak juga yang sampai kuliah dan jadi tenaga ahli. Tapi tidak menutup mata bahwa masih ada yang memiliki kondisi itu tadi," bebemnya.

Sementara itu, untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, Koordinator Humanity and Inclusion, Swetika Eko Setyono menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan Lokakarya Nasional Mendorong Partisipasi Kelompok Rentan dalam Upaya Implementasi Pembangunan Inklusif.

"Harapannya program ini akan meningkatkan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan untuk melahirkan kebijakan pub-

lic yang pro kesejahteraan kelompok rentan," ucapnya.

Lokakarya tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari proyek "Membangun Kapasitas dan Aliansi Daerah untuk Proses Manajemen Keuangan Publik yang Inklusif dan Terbuka di Indonesia" yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016.

"Tujuan Lokakarya ini adalah menyebarkan kepada stakeholder level nasional tentang praktik-praktik baik implementasi pembangunan yang inklusif, mendorong komitmen bersama peningkatan partisipasi penyandang disabilitas," ujarnya. Hadir dalam Lokakarya Nasional tersebut yakni perwakilan dari berbagai kota Pokja Menuju Kota Inklusif dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005